PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KECAMATAN LAHAM KABUPATEN MAHAKAM ULU

Adi Kirana¹ Muhammad Noor², Melati Dama³

Abstrak

Adi Kirana, Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu di bawah bimbingan Bapak Dr. H. Muhammad Noor, M.Si dan Ibu Melati Dama S.sos., M.Si.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu. Untuk mengetahui hambatan dalam pembangunan infrastruktur di Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini akan di tentukan berdasarkan pada teori yang ada, adapun fokus penelitian ini yaitu sarana Kesehatan, sarana Pendidikan, sarana Transportasi dan sarana Keagamaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pembangunan infrastruktur pada sarana kesehatan, Pemkab Mahakam Ulu dalam melakukan pembangunan sarana kesehatan di Kecamatan Laham dari Puskesmas dan Pustu, serta pengusulan anggaran dana untuk perbaikan fasilitas gedung puskesmas, berupa perbaikan puskesmas dan penambahan ruangan. Dalam pembangunan insfrastruktur sarana pendidikan saat ini, Kecamatan Laham berupaya melakukan pembangunan infrastruktur pendidikan sesuai dengan anggaran yang tersedia, seperti penambahan pada Ruang Kelas, pembangunan Rumah Dinas Guru dan perbaikan semenisasi halaman SLTP. Pembangunan transportasi dasar dalam pelebaran badan jalan yang masih berupa tanah. Pembangunan infrastruktur sarana transportasi melalui tahap perencanaan dengan penyusunan RPJM dan RKP. Tahapannya pembangunan sarana keagamaan yang sudah ada dalam perencanaan terhambat dari belum adanya anggaran pembangunan. Hambatan dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur adalah permasalahan utama yaitu minimnya infrastruktur dasar, lamanya anggaran yang di usulan ke Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, sarana jalan darat yang memadai untuk memudahkan aksesibilitas kegiatan masyarakat sehingga harga pokok kebutuhan

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: adikirana95.ak@gmail.com

² Dosen Pembimbing 1, Staf Pengajar Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

³ Dosen Pembimbing 2, Staf Pengajar Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

masyarakat menjadi lebih tinggi, ketersediaan listrik di Kecamatan Laham yang belum tersedia 24 jam, sulitnya jangkauan transportasi.

Kata Kunci : Motivasi, kerja pegawai.

Pendahuluan

Pembangunan infrastruktur memiliki peranan penting dalam mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pembangunan infrastruktur merupakan dinamika organisasi publik yang harus dilakukan untuk mendukung pengembangan wilayah. Pembangunan infrastruktur merupakan determinan penting untuk menunjang kelancaran kegiatan sosial ekonomi pada suatu daerah karena tanpa adanya infrastruktur yang memadai kegiatan perekonomian kurang lancar dan dapat menghambat pembangunan.

Secara geografis Kabupaten Mahakam Ulu terletak di daerah pedalaman yang berbatasan langsung dengan Serawak (Malaysia Timur) dimana Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat yang disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada 14 Desember 2012 di gedung DPR RI tentang Rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (DOB). Kecamatan Laham merupakan salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Mahakam Ulu yang terdiri dari beberapa kampung diantaranya adalah Desa Laham, Desa Muara Ratah, Desa Danum Paroy, Desa Long Gelawang, dan Desa Nyaribungan. Dari hasil Observasi di salah satu Kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu yaitu di Kecamatan Laham, masih terdapat beberapa permasalaham yang di hadapi pemerintah daerah kabupaten Mahakam Ulu dalam hal usaha pembangunan infrastruktur.

Beberapa permasalahan mendasar yang terjadi saat ini ialah: Adanya keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, saat ini sungai Mahakam menjadi akses utama bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas pemerintahan dan perekonomian setempat dikarenakan transportasi jalur darat masih sangat terbatas karena kondisi jalan yang sangat rusak dikarenakan belum adanya semenisasi serta belum adanya jembatan penghubung antar desa dan kecamatan menjadikan speedboat, kapal atau perahu ces sebagai transportasi utama yang digunakan masyarakat untuk menjalankan aktivitasnya.

Selain sarana dan prasarana transportasi, teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi salah satu kendala, ini dikarenakan hanya ada satu tower jaringan telekomunikasi yang ada di kecamtan Laham sehingga masyarakat masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses informasi baik telepon maupun internet terutama di desa-desa yang tergolong jauh dari jangkauan jaringan telekomunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan instrument dalam mengoptimalkan proses pembangunan, yaitu dengan memberikan dukungan terhadap manajemen dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan Laham. Permasalahan selanjutnya yaitu keterbatasan sarana dan prasarana

penyedia air bersih yang memadai yang mana mayoritas masyarakat disana masih menggunakan sumur dan jamban (rakit) dalam memenuhi kebutuhan MCK (mandi, cuci, kakus) dikarenakan belum adanya PDAM dan masalah sangat penting yaitu keterbatasan sumber listrik yang tersedia di Kecamatan Laham yang hanya memiliki Unit Listrik Desa (ULD) yang memberikan pelayanan kepada masyarakat selama 6 jam, dari pukul 18.00 sampai dengan pukul 24.00 WITA listrik tersebut hanya bisa di rasakan oleh masayarakat desa Laham saja berbeda dengan masyarakat desa lainnya yang masih menggunakan mesin genset pribadi dikarenakan belum adanya PLN.

Jika dilihat dari berbagai kendala-kendala dan permasalahan pembangunan infrasrtuktur yang dilakukan kurang optimal maka kepentingan masyarakat dan penyelenggaraan tugas pemerintahan kurang efektif. Program pembangunan meliputi pembangunan infrastruktur, dibidang prasarana jalan, jembatan, kesehatan, pendidikan, maupun bidang ekonomi. Diharapkan melalui pembangunan tersebut dapat memperlancar kegiatan masyarakat berbagai hal sehingga kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan.

Dengan melihat uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai masalah tersebut secara ilmiah melalui skripsi yang berjudul "Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu".

Kerangka Dasar Teori Pembangunan Infrastruktur

Pengertian Pembangunan

Menurut Subandi (2011:9), pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu perubahan, pembangunan disini diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan; setiap orang atau kelompok orang tentu akan mengharapkan perubahan yang mempunyai bentuk lebih baik bahkan sempurna dari keadaan yang sebelumnya; untuk mewujudkan harapan ini tentu harus memerlukan suatu perencanaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang.

Adapun pembangunan menurut Rogers (dalam Rochajat, dkk, 2011:3), pembangunan menurut adalah perubahan yang berguna menuju sustu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. Selanjutnya menurut W.W Rostow (dalam Abdul, 2004:89) pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang maju.

Menurut Subandi (2011:13), usaha dalam bidang ekonomi ditujukan untuk menambah peralatan modal dan keterampilan agar satu sama lain dapat saling mendukung usaha-usaha dalam peningkatan pendapatan perkapita serta produktivitas perkapita. Pemupukan modal sangat tergantung pada tabungan dalam negeri, terutama tabungan masyarakat, untuk itu berbagai upaya perlu diupayakan untuk mencapainya.

Dalam hal ini perlu kita ketahui bersama bahwa terdapat beberapa teori pembangunan yaitu:

- 1. Teori Modernisasi
- 2. Teori Ketergantungan
- 3. Teori Pasca Ketergantungan
- 4. Teori Alternatif

Teori modernisasi adalah sebuah negara mengakui bahwa negara berjalan secara linear dari tradisional menuju kearah modernisasi, teori ketergantungan meyakini bahwa sebuah negara tidak akan lepas dari negara lain, teori pasca ketergantungan merupakan negara yang kecil dimungkinkan lepas dari negara adidaya melejit sendiri, dan teori alternatif berharap negara-negara yang selama ini saling berkompetisi dalam hal persenjataan bergerak maju seakan-akan tidak ada perang.

Menurut Zulkarnaen (dalam Budiman, 2009:28) menyebutkan juga bahwa bagi negara-negara berkembang, hasil yang di petik dari pelaksanaan pembangunan selain pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapat juga sejumlah pelajaran. Yaitu pelajaran bagaimana merumuskan konsep pembanguan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan asrirasi masing-masing. Dari pengalaman pembangunan selama ini, serta kritik-kritik yang muncul, ternyata tumbuh sebuah ide dengan gagasan yang berguna untuk menyempurnakan konsep pembangunan pada tahapan yang berikutnya. Karena pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu proses dinamis yang senantiasa berkembang terus dalam menjawab tuntutan kebutuhan serta kondisi perkembangan zaman, demikian pula sama halnya dengan konsep-konsep dan gagasan yang mendasarinya, akan terus mengalami penyempurnaan.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan

Kemudian dalam pelaksanaan pembnagunan ada beberapa hal yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses pembangunan. Menurut Riady dan Bratakusumah (2011:39), dalam proses pembangunan ada lima dimensi-dimensi juga yang perlu diperhatiakan adalah sebagai berikut:

- a. Faktor Lingkungan.
 - 1. Sosial.
 - 2. Budaya.
 - 3. Ekonomi.
 - 4. Politik.
- b. Faktor sumber daya manusia perencana.
- c. Faktor sistem digunakan.
- d. Faktor perkembangan ilmu dan teknologi.
- e. Faktor pendanaan.

Strategi Pembangunan

Menurut Siagian (2009:81) tidak ada satupun strategi pembangunan yang cocok digunakan oleh negara berkembang yang ingin meningkatkan kesejahteraan materil para warganya hal ini disebabkan oleh adanya beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu:

- 1. Jumlah penduduk.
- 2. Tingkat pendidikan masyarakat.
- 3. Luasnya wilayah kekuasaan negara.
- 4. Topografi wilayah kekuasaan negara.
- 5. Jenis dan jumlah kekayaan negara yang dimiliki.
- 6. Sistem politik yang berlaku di negara yang dimiliki.
- 7. Persepsi para pengambil keputusan tentang prioritas pembangunan yang berkaitan dengan sifat keterbelakangan yang dihadapi oleh masyarakat.

Kemudian ada juga beberapa permasalan yang akan dihadapi menurut Effendi (2010:45-50) antara lain:

- 1. Keterbatasan kapasitas SDM
- 2. Keterbatasan kapasitas SDM DPRD sebagai pelaksana fungsi legislasi
- 3. Kurangnya infrastruktur penunjang pembangunan-pembangunan daearah
- 4. Masih adanya keterbatasan dana di daerah
- 5. Masih rendahnya akses pasar dan pemanfaatan teknologi oleh masyarakat daerah.

Dalam Keputusan Presiden RI No. 81 Tahun 2001 Tentang Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur, disebutkan dalam Pasal 2, bahwa pembangunan infrastruktur mencakup:

- 1. Prasarana dan sarana perhubungan.
- 2. Prasarana dan sarana pengairan.
- 3. Prasarana dan sarana permukiman.
- 4. Bangunan dan jaringan utilitas umum.

Konsep Infrastrukur

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Infrastruktur adalah prasarana. Berdasarkan pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa infrastruktur disini adalah segala bentuk prasarana yang merujuk pada bentuk fasilitas-fasilitas fisik yang mendukung kegiatan manusia. Kemudian menurut Grigg (dalam Kodoatie, 2013:8) Infrasyruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainese, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkungan sosial dan ekonomi. Selain itu, Kelompok Bidang Keahlian Manajemen Rekayasa Konstruksi ITB (2001), mengartikan infrastruktur (prasarana) adalah bangunan atau fasilitas fisik yang dikembangkan untuk mendukung pencapaian tujuan sosial dan ekonomi suatu masyarakat atau komunitas.

Dikatakan oleh Badan Penelitian dan Pembangunan Dalam Negeri (dalam Ulyani, 2013:19) pembangunan sarana fisik diartikan sebagai alat atau fasilitas

yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana fisik seperti dimaksud, berupa:

- a) Prasarana perhubungan yaitu: jalan, jembatan, dan lain-lain.
- b) Prasarana pemasaran yaitu: gedung dan pasar.
- c) Prasarana sosial yaitu: gedung sekolah, rumah-rumah ibadah dan puskesmas.
- d) Prasarana produksi saluran air.

Menyikapi tentang pembangunan infrastruktur terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh, antara lain:

- 1. Membuka keterisolasian wilayah.
- 2. Meningkatkan aktivitas dan mendukung kelancaran roda ekonomi wilayah.
- 3. Mempermudah akses penggunaan teknologi dan pemanfaatan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, pemerintahan dan lain-lain.
- 4. Peningkatan mobilitas dan kontak sosial antar penduduk di berbagai daerah. (Tjokroamidjojo, 2005:162).

Mencermati pendapat diatas, pembangunan infrastruktur merupakan determinan penting, tidak hanya bermanfaat untuk kelancaran perekonomian masyarakat, tetapi juga dapat mempermudah aksesbilitas diberbagai sektor dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat. Dari pemikiran tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan dinamika organisasi publik yang harus dilakukan untuk mendukung pengembangan wilayah.

Pemerintah Daerah

Pengertian Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah merupakan unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Pemerintah Daerah

Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah yang menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah:

- 1. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- 2. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- 3. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

Definisi Konsepsional

Pemerintah Daerah dalam pembangunan infrastruktur di Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu adalah suatu proses penentuan rencana yang berfokus pada tujuan jangka panjang, disertai penyusunan suatu cara atau upaya agar tujuan tersebut dapat dicapai oleh pemerintah daerah sebagai proses perubahan yang dilakukan secara berkesinambungan oleh pemerintah daerah untuk membangun daerahnya dan membawa perubahan terhadap kondisi infrastruktur di daerah tersebut untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan yang berasal dari metode wawancara, pengamatan, cacatan lapangan, dan lain sebagainya. Jadi, dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian kualitatif deskriptif yaitu peneliti menjelaskan fenomena yang terjadi dilapangan dengan menggunakan metode wawancara, pengamatan langsung, dokumentasi, dan lain sebagainya. Hasil dari penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu mengenai Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu provinsi Kalimantan Timur. Adapun waktu dalam melakukan penelitian yang penulis tentukan dalam menyusun skripsi ini dimulai pada bulan juni 2017 dan di perkirakan sekitar bulan april 2018.

Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini akan ditentukan berdasarkan pada teori yang ada, adapun fokus penelitian ini adalah

- 1. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu.
 - a. Sarana Kesehatan.
 - b. Sarana Pendidikan.

- c. Sarana Transportasi.
- d. Sarana Keagamaan.
- 2. Hambatan dalam pembangunan infrastruktur di Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu.

Sumber Data

Sumber data adalah obyek dimana data diperoleh untuk mempermudah dalam mengklasifikasikan data. Menurut Sutopo (2002:49) bahwa dalam penelitian kualitatif sumber datanya dapat berupa manusia (informan), peristiwa/aktifitas, tempat (lokasi), benda, beragam gambar, rekaman, dokumen, serta arsif.

Dari pendapat tersebut dijelaskan bahwa sumber data diklarifikasikan menjadi tiga yaitu:

- 1. Person (orang), dalam penelitian ini yang menjadi sumber data/key informan maupun informan dalam pengumpulan data:
 - a. Key Informan yaitu Camat Laham.
 - b. Informan Sekretaris Camat Laham dan Kepala Seksi Pemerintahan.
 - c. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Bidang Cipta Karya.
- 2. *Place* (lokasi/tempat), yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam atau bergerak. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Kantor Kecamatan Laham.
- 3. *Paper* (dokumen), yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau simbol-simbol lain. Data yang dimaksud berupa buku-buku pustaka, dokumen, arsip, surat-surat dan sebagainya yang menjadi paduan peneliti dalam melakukan penelitian.

Tehnik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan datanya yaitu dengan menggunakan:

- 1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).
- 2. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*), darinya penulis langsung mengadakan penelitian kelapangan dengan mempergunakan beberapa cara yaitu: Observasi, Wawancara dan Penelitian Dokumen.

Tehnik Analisis Data

Analisa data kualitatif terdiri dari 4 komponen, antara lain:

- 1. Pengumpulan Data
- 2. Penyederhanaan Data (Data Reduction)
- 3. Penyajian Data (*Data Display*)
- 4. Penarikan Kesimpulan (Conclution Drawing)

Hasil Penelitian

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Mahakam Ulu

Kabupaten Mahakam Ulu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, yang secara geografis terletak antara 0°45'-2°27' Lintang Selatan dan 115°36'-166°57' Bujur Timur dengan luas wilayah 15.315,00 Km². Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu didominasi kontur permukaan yang bergelombang, dari kemiringan landai sampai curam dengan ketinggian berkisar antara 0 - 1.500 meter diatas permukaan laut dengan kemiringan antara 0-60 persen. Daerah dataran rendah pada umumnya dijumpai di kawasan sepanjang daerah aliran sungai (DAS). Sedangkan daerah perbukitan dan pegunungan memiliki ketinggian rata-rata lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan 30 persen terdapat di bagian barat laut yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia.

Karakteristik iklim Kabupaten Mahakam Ulu termasuk dalam kategori iklim tropika humida, dengan rata-rata curah hujan tertinggi terdapat pada bulan April dan terendah di bulan Agustus, serta tidak menunjukkan adanya bulan kering atau sepanjang bulan dalam satu tahun selalu terdapat sekurang-kurangnya tujuh hari hujan. Namun demikian dalam tahun-tahun terakhir ini, keadaan iklim di Kabupaten Mahakam Ulu terkadang tidak menentu.

Kecamatan Laham

Kecamatan Laham adalah salah satu kecamatan dari 5 kecamatan yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu. Kecamatan Laham hasil Pemekaran Kecamatan Long Hubung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2003 dan perubahannya (saat ini masuk dalam wilayah Pemekaran Kabupaten Mahakam Ulu) merupakan Kecamatan termuda yang terletak pada 1140 46' 05" BT dan 1150 26' 11" BT serta 00-24"LU dan 00 11'LU dengan luas wilayah ± 901.80 km².

Hasil Penelitian

Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu. Sarana Kesehatan

Upaya Pemerintah Daerah dalam pembangunan infrastruktur di Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu saat ini untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya di daerah Kecamatan Laham telah banyak dilakukan, diantaranya seperti penyuluhan kesehatan tentang hidup sehat, penyediaan fasilitas umum seperti Puskesmas dan Puskesmas Pembantu terutama rumah sakit di Kabupaten Mahakam Ulu dan juga bagi kecamatan-kecamatan pemekaran.

Sarana kesehatan di 5 desa Kecamatan Laham, fasilitas gedung di Desa Laham, bangunan fisiknya dibangun permanen dan terbuat dari beton, sedangkan semua bangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) di 4 desa lainnya, masih berbahan kayu. Fasilitas kesehatan di Desa Laham sudah terakreditasi dan memiliki standar

pelayanan kesehatan. Memenuhi syarat akreditasi, karenna Puskesmas Laham memiliki alat kesehatan, obat-obatan, dan tenaga medis yang lengkap. Puskesmas Laham juga memiliki 1 mobil, 1 speedboat dan 1 motor dinas Puskesmas Laham. Puskesmas di Kecamatan Laham memiliki ketersediaan ruang pemeriksaan dan ruang inap. Puskesmas Pembantu (Pustu) di 4 desa hanya menyediakan alat medis, obat-obatan dan kendaraan dinas hanya 1 unit motor.

Pembangunan insfrastruktur sarana kesehatan di Kecamatan Laham dari Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (PUSTU), serta pengusulan anggaran dana untuk perbaikan fasilitas gedung puskesmas, berupa perbaikan puskesmas dan penambahan ruangan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Munsrenbang) diikuti oleh pejabat dan instansi terkait, Pemerintah Desa, tokoh masyarakat dan perwakilan dari setiap desa. Karena tidak semua masyarakat yang bisa ikut hadir dalam rapat tersebut, apalagi masyarakat sudah memberi masukan saat musyawarah di Kecamatan Laham, jadi perwakilan yang hadir di Kecamatan Laham di rasa sudah cukup. Sarana kesehatan yang dibangun di Kecamatan Laham sekarang, hanya perbaikan fasilitas gedung Puskesmas. Begitu pencairan dana dari Kabupaten Mahakam Ulu, yang dilibatkan sesuai dengan bidangnya. Untuk pembangunan dari infrastruktur fisik seperti gedung Puskesmas sekarang itu cukup baik, namun ada beberapa yang rusak dan tidak memadai dan perlu diperbaiki.

Sebelum dilakukan pembangunan, tentunya akan di adakan sosialisai terlebih dahulu agar masyarakat tahu dimana pembangunan akan dilaksanakan. Informasinya melalui sosialisasi oleh Kepala Desa dan Camat Kecamatan Laham. Selama ini pembangunan yang akan dilaksanakan di Kecamatan Laham masih menunggu anggaran. Informasinya itu cuma disampaikan ke desa yang bersangkutan. Misalnya perencanaan waktu semenisasi dibeberapa gang di Kecamatan Laham agar masyarakat mengetahui rencana pembangunan. Informasi akan diberikan kepada masyarakat, tentang kegiatan pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Munsrenbang) yang dilakukan oleh Bupati Mahakam Ulu, disitu akan disampaikan kapan waktu pelaksanaan pembangunan insfrastruktur jika anggaran Kecamatan sudah diperoleh.

Pendapat dari masyarakat Kecamatan laham mengenai Kabupaten Mahakam Ulu dalam melakukan pembangunan insfrastruktur sarana kesehatan di Kecamatan Laham sesuai perencanaan pembangunan yang diperoleh dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Munsrenbang) bersama dengan masyarakat. Sarana kesehatan yang dibangun dalam penerapan pelayanan kesehatan melalui Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Puskesmas Keliling.

Sarana Pendidikan

Penyediaan sarana pendidikan di Kecamatan Laham terbilang sudah termasuk lengkap. Karena sudah tersedianya fasilitas pendidikan dari usia dini, hingga ke jenjang Sekolah Menengah Umum (SMU). Sarana pendidikan di 5 desa Kecamatan Laham yang tersedia fasilitas gedung SMU dan SLTP terbuat dari

beton, sedangkan gedung SD dan TK masih berbahan kayu. Sarana pendidikan SD dan TK di desa Muara Ratah, desa Long Gelawang dan desa Nyaribungan, juga masih berbahan kayu.

Kabupaten Mahakam Ulu dalam melakukan pembangunan insfrastruktur sarana pendidikan untuk saat ini, Kecamatan Laham berupaya melakukan pembangunan infrastruktur pendidikan sesuai dengan anggaran yang tersedia, seperti penambahan pada Ruang Kelas Baru di SD 001, pembangunan Rumah Dinas Guru dan pembangunan perbaikan sekolah yaitu semenisasi halaman SLTP. Di desa Danom Paroy tidak memiliki infrastruktur pendidikan. Jadi sekolah TK dan SD bergabung di desa Muara Ratah , karena ke dua desa tersebut. Hanya terpisah oleh lapangan sepakbola. Sedangkan SLTP dan SMU, bergabung dengan Kecamatan Laham. Desa lainnya di Muara Ratah, desa Long Gelawang dan desa Nyaribungan masing-masing hanya memiliki 1 TK dan 1 SD. Sedangkan sarana pendidikan SLTP dan SMU bergabung di Kecamatan Laham.

Pembangunan sarana pendidikan di Kecamatn Laham, perlu dukungan dengan penambahan tenaga guru, baik yang berstatus PNS maupun Honorer karena tanpa dukungan tenaga pendidik, maka akan menghambat proses belajar mengajar. Juga partisipasi dari masyarakat dalam pembangunan infrastruktur bidang pendidikan di Kecamatan Laham. Yang terlibat dalam pembangunan sarana pendidikan di Kecamatan Laham yaitu dari Kabupaten mahakam Ulu, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Ketua RT, Pemerintah Desa, masyarakat dan adanya koordinasi yang baik diantara Kecamatan dan Dinas Pendidikan. Pembangunan sarana pendidikan akan dilakukan sesuai perencanaan pembangunan.

Pembangunan insfrastruktur sarana pendidikan dapat dilaksanakan dengan baik apabila Kecamatan Laham mendapatkan anggaran dari Kabupaten Mahakam Ulu. Ditinjau dari sisi pendanaan pembangunan, program Gerbang dema memprogramkan kucuran dana pembangunan sebesar 12 milyar untuk masingmasing kecamatan. Namun demikian dalam implementasinya bukan berarti pemerintah Kecamatan mendapatkan dana tersebut secara cash atau tunai.

Menurut narasumber di Kecamatan Laham, bahwa dana pendidikan tersebut tidak berupa uang saja namun berwujud pembangunan atau program lainnya baik yang datang dari Pemerintah Kabupaten ataupun yang di kelola Pemerintah Kecamatan Laham dan jika dihitung tiap tahunnya mendekati jumlah tersebut. Sedangkan mengenai manfaat dari pembangunan infrastruktur pendidikan secara langsung dirasakan oleh pihak sekolah sendiri dan secara tidak langsung dirasakan oleh para siswa dan orang tua sehubungan dengan program sekolah gratis.

Pembangunan insfrastruktur sarana pendidikan di Kecamatan Laham nanti yang terlibat yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Perencanaan pembangunan infrastruktur pendidikan telah disesuaikan dengan aspirasi dan tingkat kebutuhan masyarakat Kecamatan Laham. Penyediaan sarana pendidikan dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi generasi mendatang. Sehingga Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu telah menyediakan sarana berupa

pendidikan atau sekolah dengan jumlah dari 4 TK, 5 SD, 1 SLTP dan 1 SMU yang merupakan sarana pendidikan di Kecamatan Laham.

Adapun pendapat dari masyarakat Kecamatan laham, mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur pendidikan diarahkan untuk membangun dan melengkapi fasilitas pendidikan yang ada. Sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Laham, dengan jumlah 1 SMU, 1 SLTP, 5 SD dan 4 TK. Untuk sementara ini di upayakan untuk melakukan pembangunan yang sesuai dengan anggaran yang tersedia, seperti penambahan pada Ruang Kelas Baru SDN 001, Pembangunan Rumah Dinas untuk Guru SLTP dan pembangunan semenisasi halaman SLTP, yang terlibat dalam pembangunan insfrastruktur sarana pendidikan di Kecamatan Laham, berasal dari Kabupaten, Kecamatan Laham, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, seluruh RT, Pemerintah Desa dan partisipasi dari masyarakat. Pembangunan sarana pendidikan di Kecamatan Laham yang akan dilakukan sekarang, masih direncanakan, menunggu anggaran dana dari Kabupaten Mahakam Ulu.

Sarana Transportasi

Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu yang melakukan pembangunan infrastruktur yaitu strategi dasar dalam pelebaran badan jalan yang masih berupa tanah. Pembangunan infrastruktur sarana transportasi melalui tahap perencanaan, dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang melalui beberapa tahap. Tahapannya Kecamatan Laham yaitu mengikuti sesuai dengan ketetapan yang berlaku. Semua tahapannya jelas tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Peningkatan infrastruktur transportasi dan jalan di pedesaan merupakan sarana yang paling dibutuhkan masyarakat dalam rangka mempermudah akses, peningkatan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Instansi terkait yang terlibat dalam pembangunan insfrastruktur sarana transportasi di Kecamatan Laham yaitu Dinas Pekerjaan Umum.

Pembangunan insfrastruktur sarana transportasi di Kecamatan Laham seperti semenisasi dan untuk perbaikan jalan yang rusak. Program-program pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap, saat seperti yang difokuskan pada kebutuhan utama masyarakat yakni jalan, juga dari listrik, mesin genset yang digunakan hanya bisa 6 jam, akan di ajukan untuk genset yang mampu menghidupi lampu selama 24 jam. Kebutuhan utama di kampung ini sudah pasti jalan, kondisi jalan yang sekarang sangat menghambat untuk melakukan aktifitas, apalagi saat musim hujan itu sangat sulit membawa kendaraan jadi masyarakat hanya mengandalkan transportasi sungai.

Dalam pembangunan insfrastruktur sarana transportasi di Kecamatan Laham yang akan dilaksanakan nanti, Dinas Pekerjaan Umum sebagai penanggung jawab dan terlibat dalam pembangunan di Kecamatan Laham seperti jalan, semenisasi jalan di gang-gang, pembangunan jembatan, pembangunan Gorong-Gorong

dibeberapa titik dibeberapa RT, pembangunan turap jalan depan Puskesmas Kecamatan Laham, rehab Jembatan di Sungai Hasung Kampung Laham, rehab jembatan, pembangunan Balai Penyuluh Pertanian (BPP), perencanaan semenisasi jalan dalam kampung Laham dan perencanaan pengembangan pemukiman baru di Kecamatan Laham.

Pembangunan infrastruktur antara Kampung, RW dan RT serta jalan pendukung roda perekonomian masyarakat yang meliputi pembangunan jalan, jembatan dan drainase serta sarana prasarana lainnya terutama pada wilayah yang berpotensi menggerakkan perekonomian Laham. Sarana transportasi yang akan dibangun di Kecamatan Laham dalam perencanaan yaitu: perbaikan jalan pada sentral pengembangan pertanian, perkebunan dan usaha produktif lain, perbaikan serta pembangunan jaringan air bersih, pembangunan sanitasi, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi Laham.

Sarana Keagamaan

Pembangunan sarana keagamaan yang merupakan salah satu upaya pemenuhan hak dasar rakyat dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Untuk pembangunan sarana keagamaan sudah ada, tetapi masih dalam perencanaan. Hal tersebut terhambat dari belum adanya anggaran pembangunan. Fasilitas yang belum ada yaitu Mesjid, Mushola dan Pura, yang tersedia sekarang hanya gereja dan langgar. Bangunan gereja dan langgar, masih berbahan kayu. Camat pernah melakukan dalam menyampaikan berbagai informasi yang dianggap penting untuk diketahui dan dimintakan pendapat dan dimusyawarahkan dengan warga masyarakat, termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan sarana prasarana keagamaan.

Pembangunan sarana keagamaan dengan adanya perencanaan atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Munsrenbang) yang dilakukan di Kabupaten Mahakam Ulu, agar dalam melakukan pembangunan insfrastruktur sarana keagamaan, akan mudah terlaksana. Sarana keagamaan yang akan dibangun di Kecamatan Laham, adalah sarana ibadah bagi masyarakat Kecamatan Laham. Yang terlibat dalam pembangunan insfrastruktur sarana keagamaan nanti, tentunya masyarakat yang ada di Kecamatan Laham. karena untuk masyarakat sendiri. Semoga anggaran yang diusulkan segera diberikan oleh pemerintah daerah, agar pembangunan sarana keagamaan di Kecamatan Laham dapat dilaksanakan untuk tahun berikutnya.

Pengusulan pembangunan dengan anggaran masing-masing usulan. Dalam melakukan pembangunan insfrastruktur sarana keagamaan berdasarkan kebutuhan masyarakat di Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Munsrenbang), sehingga masyarakat Kecamatan Laham disini memiliki sarana Ibadah berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing. Pemerintah daerah Kabupaten Mahakam Ulu telah mencanangkan program peningkatan pembangunan sarana prasarana rumah ibadah di daerah Kecamatan-Kecamatan laham yang bertujuan untuk memotivasi masyarakat supaya lebih giat beribadah. 'Pembangunan rumah ibadah adalah suatu

bentuk kepedulian pemerintah daerah kepada masyarakat, supaya masyarakat di salah satu desa di Kecamatan Laham dapat beribadah dengan aman, nyaman dan tenang

Pembangunan sarana keagamaan yang akan dilakukan pada fasilitas ibadah, maka Dinas Pekerjaan Umum di Kecamatan Laham, akan melaksanakan pembangunan tersebut sesuai dengan anggaran dan usulan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu. Pembangunan sarana keagamaan di Kecamatan Laham belum ada dilakukan sekarang, karena anggaran yang diusulkan belum diperoleh Kabupaten Mahakam Ulu.

Pembangunan insfrastruktur sarana keagamaan dengan adanya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Munsrenbang) di Kabupaten Mahakam Ulu yaitu menunggu anggaran dana, untuk membangun sarana keagamaan di Kecamatan Laham. Pengusulan pembangunan sarana insfrastruktur dengan anggaran masingmasing usulan. Dalam melakukan pembangunan insfrastruktur sarana keagamaan berdasarkan kebutuhan masyarakat di Musrenbang, sehingga masyarakat Kecamatan Laham memiliki sarana Ibadah berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing.

Hambatan Yang Dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Dalam Pembangunan Infrastruktur

Hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur disebabkan oleh permasalahan utama yang dihadapi Kabupaten Mahakam Ulu saat ini adalah minimnya infrastruktur dasar yang dikarenakan masalah anggaran, yang mana dapat diketahui bahwasanya Kabupaten Mahakam Ulu merupakan pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat, ketersediaan listrik yang belum menyediakan selama 24 jam, karena listrik di Kecamatan Laham beroperasi hanya dari jam 6 sampai jam 12 malam. Saat ini Pemerintah Desa/Kecamatan Laham listrik yang tersedia hanya menggunakan mesin genset. Jika mesin genset di Kecamatan Laham mengalami kerusakan, pelayanan Kecamatan Laham tidak dapat menggunakan komputer dan jangkauan transportasi, yang saat ini transportasi yang digunakan hanya transportasi sungai mahakam.

Kasimpulan dan Saran

Kesimpulan

Dari hasil penelitian, penyajian data dan pembahasan, maka dapat di kemukakan beberapa kesimpulan bahwa pelayanan administrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan Laham Kabupaten Paser sudah cukup optimal, hal tersebut di identifikasi dari:

- 1. Pembangunan infrastruktur di Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu.
 - a. Pembangunan infrastruktur di Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu pada sarana kesehatan adalah pengusulan anggaran pembangunan yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Mahakam Ulu dan

- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kecamatan Laham dan kerja sama dengan seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu dan mengadakan Munsrenbang sehingga menerima usulan-usulan dari masyarakat.
- b. Pembangunan infrastruktur di Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu pada sarana pendidikan untuk saat ini, Kecamatan Laham berupaya melakukan pembangunan infrastruktur pendidikan sesuai dengan anggaran yang tersedia, seperti penambahan pada Ruang Kelas Baru di Sekolah Dasar 001, pembangunan Rumah Dinas Guru dan pembangunan perbaikan sekolah yaitu semenisasi halaman SLTP.
- c. Pembangunan infrastruktur di Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu pada sarana transportasi yaitu pembangunan dalam pelebaran badan jalan yang masih berupa tanah dan dengan penyusunan RPJM dan RKP. Tahapannya Kecamatan Laham mengikuti sesuai dengan ketetapan yang tercantum dalam Permendagri No. 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Instansi terkait yang terlibat dalam pembangunan insfrastruktur transportasi yaitu Dinas Pekerjaan Umum.
- d. Pembangunan infrastruktur di Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu pada sarana keagamaan yang merupakan salah satu upaya pemenuhan hak dasar rakyat dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Pembangunan sarana keagamaan yang sudah ada, tetapi masih dalam perencanaan terhambat dari belum adanya anggaran pembangunan. Fasilitas yang belum ada yaitu Mesjid, Mushola dan Pura, yang tersedia sekarang hanya gereja dan langgar yang masih berbahan kayu.
- 2. Hambatan dalam pembangunan infrastruktur di Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu adalah permasalahan utama yang dihadapi Kabupaten Mahakam Ulu saat ini adalah minimnya infrastruktur dasar, lamanya anggaran yang di usulan ke Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, sarana jalan darat yang memadai untuk memudahkan aksesibilitas kegiatan masyarakat sehingga harga pokok kebutuhan masyarakat menjadi lebih tinggi, ketersediaan listrik di Kecamatan Laham yang belum tersedia 24 jam, sulitnya jangkauan transportasi, yang saat ini hanya mengandalkan transportasi sungai mahakam dalam menjalankan aktivitas pemerintahan dan perekonomian masyarakat.

Saran

Adapun saran yang akan penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

- 1. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, seharusnya melakukan pembangunan semenisasi infrastruktur transportasi jalur darat sebagai jalan penghubung antar kampung. Kondisi jalan transportasi darat menjadi rusak apabila terjadi hujan.
- 2. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dapat meningkatan pelayanan listrik yang bisa menyediakan listrik yang digunakan masyarakat full 24 jam yang sampai saat ini, listrik hanya beroperasi selama 6 jam. Seharusnya Pemerintah

- Kabupaten Mahakam Ulu memiliki solusi dalam menyelesaikan masalah listrik tersebut.
- 3. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu seharusnya lebih mengutamakan dalam mengusulkan anggaran pembangunan infrastruktur di Kecamatan Laham dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang tujuannya untuk mengatasi kebutuhan dasar mempermudah akses, peningkatan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menggerakan perekonomian masyarakat Kecamatan Laham.

Daftar Pustaka

Budiman, Arief. 2009. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.

Effendi, Bachtiar. 2010. *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, Uhaindo Media dan Offset.

Kodoatie, 2013. Pengantar Manajemen Infrastruktur. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Siagian, Sondang. P. 2009. Administrasi Pembangunan Konsep Dimensi, dan Strateginya. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Subandi. 2011. Ekonomi Pembangunan. Bandung: Alfabeta.

Tjokroamidjoyo, Bintoro. 2005. *Good Governance: Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Volume II No. 1 FIA. Malang: UNBRAW.

Ulyani, Grand. 2013. *Badan Penelitian dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Dokumen- Dokumen:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Keputusan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2001 Tentang Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur